

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

Havid Sularso

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman
Jl. HR. Bunyamin No. 708, Grendeng Purwokerto 53122
Tlp. +62281-637970, HP. +628122708361
email: hvd208@gmail.com

Yanuar E. Restianto

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman
Jl. HR. Bunyamin No. 708, Grendeng Purwokerto 53122
Tlp. +62281-637970, HP. +628122959969
email: yan_retianto@yahoo.com

Abstrak

Kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dengan kinerja keuangan, dapat digunakan sebagai alat mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kemajuan satu daerah salah satunya dapat ditinjau dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai stimulus ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Metoda analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan program *Analysis of Moment Structures* (AMOS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kinerja keuangannya karena berdampak pada peningkatan belanja modal, sehingga harus mendapatkan prioritas yang memadai.

Kata kunci: kinerja keuangan, alokasi belanja modal, pertumbuhan ekonomi

Abstract

Local financial capacity shown by the financial performance, can be used as a tool to measure success in implementing decentralization. The progress of a region one of which is shown by good economic growth, where one of the factors that affect economic growth is investment issued by local governments as economic stimulus. This study aims to determine the influence of regional financial performance of the allocation of capital expenditure and capital expenditure allocation impact on economic growth. Data analysis methods using Structural Equation Modeling (SEM) with the program Analysis of Moment

Structures (AMOS). The results of this study showed that the allocation of capital expenditure are influenced by regional financial performance, the allocation of capital expenditures affect economic growth, and economic growth is indirectly affected by the performance of local financial. The practical implications of this research is that local governments continuously improve financial performance particularly in terms of financial independence to allocate capital expenditure sufficiently, so as to enhance regional economic growth.

Keywords: financial performance, capital expenditure allocation, economic growth.

PENDAHULUAN

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur

menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesuksesan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Setiaji dan Adi (2007) menggunakan tingkat kemampuan keuangan daerah yang diukur dengan kinerja pendapatan asli daerah. Sedangkan Adi (2005) menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah memasuki era otonomi untuk membedakan tingkat kesiapan daerah. Ardi (2008) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup. Todaro (1997) dalam Adi (2007) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor tersebut di atas yang menarik untuk dikaji

lebih lanjut adalah akumulasi modal, yang terkait erat dengan investasi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa investasi juga memiliki kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006, investasi adalah setiap pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani masyarakat.

Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, di mana salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan investasi maka kemampuan keuangan daerah juga harus memadai. Indikator besar kecilnya investasi daerah adalah tingginya rasio belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah seperti derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan alokasi belanja modal serta kinerja keuangan. Secara empiris belum banyak bukti yang mengkaitkan langsung antara kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan daerah. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

TINJAUAN PUSTAKADAN HIPOTESIS

Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana

dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, *debt service coverage ratio*, dan pertumbuhan.

Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Ketergantungan keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/propinsi. Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pem-bangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan pemerintah daerah pun semakin baik. Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut di atas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007). Apabila persentase kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100 % adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas perlu disandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dengan realisasi PAD yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu perlu dihitung secara cermat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh PAD yang diterima tersebut efisien atau tidak. Hal tersebut perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai target,

namun jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan PAD lebih besar dari realisasi pendapatan itu sendiri maka berarti pemerintah daerah belum efisien. Rasio efisiensi juga menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya.

Pada sektor pelayanan publik suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Khusus dalam bidang keuangan daerah, penilaian efisiensi keuangan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan di atas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien. Faktor penentu efisiensi dan efektivitas sebagai berikut (Budiarto, 2007): a. faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan; b. faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu struktural maupun fungsional; c. faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan; d. faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat; e. faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang

bersifat rutin. Belanja modal diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok pertama adalah belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat langsung dinikmati masyarakat misalnya: pembangunan jembatan, pembelian mobil ambulan untuk umum dan lain-lain. Kelompok kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan langsung oleh aparatur misalnya: pembangunan gedung dewan, pembelian mobil dinas dan lain-lain. Hampir semua anggaran belanja modal mengandung komitmen adanya pengeluaran dalam jangka yang cukup panjang.

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Halim (2008) menyatakan bahwa kata investasi dapat diartikan macam-macam tergantung pada titik pandang atau konteks mengartikannya. Dalam bahasa ekonomi makro investasi dapat diartikan berbeda dengan bahasa ekonomi mikro, dan dapat berbeda pula dengan bahasa akuntansi. Dalam bahasa akuntansi pada konteks jenis belanja/biaya, investasi dapat dimunculkan dari adanya perbedaan antara *revenue expenditure* dan *capital expenditure*. Investasi termasuk dalam pengertian belanja modal adalah *capital expenditure*, yang didefinisikan sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun.

Dalam PP No. 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 Laporan Realiasi Anggaran mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Todaro (1997) dalam Adi (2007) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi.

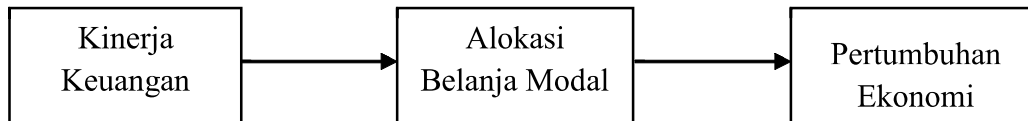
Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai meningkatnya kegiatan ekonomi pada suatu daerah yang akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian daerah. Pertumbuhan ini akan terjadi apabila seluruh pemangku kepentingan di daerah bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi seperti

meningkatkan investasi. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan di sektor-sektor yang produktif.

Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi. Sependapat dengan hal itu, Bappenas (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua pendapat ini menyiratkan perlunya prioritas kebijakan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang lebih menekankan pada upaya peningkatan PAD secara langsung.

Kerangka Pemikiran

Konsekuensi logis diberlakukannya otonomi daerah adalah menyebabkan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah mempunyai wewenang lebih luas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik pula. Kinerja keuangan akan dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Alokasi belanja modal yang memadai akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja keuangan yang baik juga diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif alat untuk memprediksi kontribusi anggaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan penjelasan literatur di atas maka secara skematis kerangka pemikiran penelitian dikembangkan dalam sebuah model seperti di bawah ini.



Hipotesis

- H₁: Kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD secara langsung berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.
- H₂: Alokasi belanja modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₃: Kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Jawa Tengah, yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota. Seluruh Kabupaten/Kota dijadikan sampel dalam penelitian ini, karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi suatu permasalahan tetapi menguji pengaruh antar variabel yang diteliti. Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2006 – 2009 yang disusun berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah serta data-data statistik ekonomi daerah.

efektivitas dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Definisi Operasional Variabel

Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Ketertanggung jawaban keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketertanggung jawaban daerah terhadap pemerintah pusat/propinsi. Ketertanggung jawaban keuangan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Ketertanggung Jawaban Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kemandirian keuangan adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Prop} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Efektivitas PAD adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio

Derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Derajat kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan bagian laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Alokasi belanja modal adalah alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dibandingkan dengan total belanja dalam APBD. Alokasi belanja modal dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah kenaikan (GDP) atau PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB merupakan laju pertumbuhan dari tahun ke tahun yang dihitung dengan formula:

$$G = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

di mana :

G : laju pertumbuhan PDRB

$PDRB_t$: PDRB kuartal t

$PDRB_{t-1}$: PDRB kuartal t-1

Teknik Analisis Data

Pola pengaruh antar variabel yang diteliti merupakan pengaruh sebab akibat dari satu atau beberapa variabel independen kepada satu atau beberapa variabel dependen. Bentuk pengaruh sebab akibat dalam penelitian ini menggunakan model yang tidak sederhana, yaitu adanya variabel yang berperan ganda, sebagai variabel independen pada suatu kasus, namun menjadi variabel dependen pada kasus lain. Bentuk pengaruh seperti ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan secara simultan pengaruh tersebut, yaitu *Structural Equation Modeling* (SEM). Pengolahan SEM menggunakan program *Analysis of Moment Structures* (AMOS). Dengan menggunakan metode SEM akan memudahkan analisis secara simultan, lebih ringkas dan efisien.

Dalam menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Pengembangan model teoritis

Pada langkah pengembangan model teoritis, dilakukan serangkaian eksplorasi ilmiah melalui telaah pustaka guna mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang akan dikembangkan. SEM digunakan bukan untuk menghasilkan sebuah model, tetapi digunakan untuk mengkonfirmasi model teoritis tersebut melalui data empirik.

2. Pengembangan diagram alur (*path diagram*)

Dalam langkah kedua ini, model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama digambarkan dalam sebuah *path diagram*, yang akan mempermudah untuk melihat pengaruh kausalitas yang ingin diuji. Dalam diagram alur, pengaruh antar konstruk akan dinyatakan melalui anak panah. Anak panah yang lurus menunjukkan sebuah pengaruh kausal yang langsung antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Sedangkan garis-garis lengkung antar konstruk

dengan anak panah pada setiap ujungnya menunjukkan korelasi antara konstruk.

3. Mengkonversi diagram alur ke dalam persamaan struktural dan model pengukuran.
4. Evaluasi kriteria *goodness of fit*

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai kriteria *goodness of fit*. Berikut ini beberapa indeks kesesuaian dan *cut-off value* untuk menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak (Ferdinand, A., 2002):

- a). *X²-Chi-square* statistik, yaitu model dipandang baik atau memuaskan bila nilai *chi-square*-nya rendah. Semakin kecil nilai *X²* semakin baik model itu dan diterima berdasarkan probabilitas dengan *cut-off value* sebesar $p > 0.05$
- b). *RMSEA (The root Mean Square Error of Approximation)*, indeks untuk mengkompensasi *chi square statistic* dalam sampel yang besar (Baumgartner & Homburg, 1996). Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah *close fit* dari model itu berdasarkan *degrees of freedom*
- c). *GFI (Goodness of Fit Index)* adalah menghitung proporsi tertimbang dari varian dalam matriks kovarian sampel yang dijelaskan oleh matrik kovarian populasi yang diestimasi. Ukuran non statistik yang mempunyai rentang nilai antara 0 (*poor fit*) sampai dengan 1.0 (*perfect fit*)
- d). *AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)*, GFI adalah analog dari *R²* dalam regresi Berganda. GFI mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,90
- e). *CMIN/DF*, adalah *The Minimum Sample Discrepancy Function* yang dibagi

dengan *Degree of Freedom*. CMIN/DF tidak lain adalah statistik *chi-square*, X^2 dibagi DFnya disebut X^2 relatif. Bila nilai X^2 relatif kurang dari 2.0 atau 3.0 adalah indikasi dari *acceptable fit* antara model dan data

- f). TLI (*Tucker Lewis Index*), merupakan *incremental index* yang membandingkan sebuah model yang diuji terhadap sebuah *base line model*, dimana nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model adalah 0,95 (Hair *et al.* 1995) dan nilai yang mendekati 1 menunjukkan *a very good fit*
- g). CFI (*Comparative Fit Index*), di mana bila mendekati 1, mengindikasikan tingkat fit yang paling tinggi. Nilai yang direkomendasikan adalah CFI 0,95.

Setelah model tersebut memenuhi syarat, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah uji *regression weight/loading factor*. Uji ini dilakukan sama dengan uji t terhadap *regression weight/loading factor*/koefisien (β) Uji ini untuk menolak hipotesis nol yakni koefisien $\beta_i = 0$ (yakni: bobot regresi variabel *latent* dengan variabel *observer* tidak diterima atau bobot regresi variabel *independent* dengan variabel *dependent* tidak diterima).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kinerja Keuangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan lebih dari sepuluh tahun dengan berbagai perbaikan regulasi khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 membawa konsekuensi

bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan akuntansi yang hasil akhirnya adalah laporan keuangan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik. Berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat dilakukan analisis rasio-rasio keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk menilai kinerja keuangan daerah dibutuhkan alat bantu berupa analisis laporan keuangan, karena tidak semua pengguna laporan keuangan dengan mudah dapat memahami isi laporan keuangan. Salah satu teknik yang banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Terdapat berbagai macam rasio laporan keuangan seperti rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio likuiditas, solvabilitas, derajat kontribusi BUMD, DSCR, DSR, rasio belanja terhadap PDRB, rasio efisiensi belanja dan sebagainya.

Sampai dengan tahun 2009 beberapa rasio laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) rerata derajat desentralisasi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebesar 9%; 2) rerata rasio kemandirian keuangan adalah sebesar 10%, 3) rerata rasio efektivitas PAD adalah 117%, 4) rerata rasio derajat kontribusi BUMD hanya 4%, 5) rerata alokasi belanja modal adalah sebesar 21%.

Jika kinerja keuangan daerah dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, maka salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa anggaran belanja pemerintah daerah seharusnya menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Saragih (2003) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi. Bappenas (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua pendapat ini menyiratkan perlunya prioritas kebijakan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daripada kebijakan yang lebih menekankan pada upaya peningkatan PAD secara langsung. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah adalah dengan menaikkan alokasi belanja modal setiap tahunnya agar fungsi anggaran pemerintah daerah sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Adi (2005) menyatakan bahwa belanja pembangunan (belanja modal) memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat rerata alokasi belanja modal pemerintah daerah di Jawa Tengah sebesar 21%, masih di bawah rerata nasional yaitu sebesar 28,8%. Alokasi belanja modal pemerintah daerah di Jawa Tengah tersebut hanya mampu menghasilkan

pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,43%.

Statistik Deskriptif

Tabel 1 statistik deskriptif di bawah menunjukkan bahwa variabel ketergantungan keuangan memiliki standar deviasi tertinggi yakni 5,28 dengan *mean* 4,03, kemudian variabel pertumbuhan ekonomi memiliki *mean* 4,37 dengan standar deviasi 1,10. Variabel derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, efektivitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD dan belanja modal masing-masing memiliki *mean* di bawah 1,2 dengan standar deviasi kurang dari 0,5.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
Derajat Desentralisasi	70	.05	.18	.0826	.02406	2.156	.287
Ketergantungan Keuangan	70	.66	16.77	4.0380	5.28401	1.213	.287
Kemandirian Keuangan	70	.05	.23	.0929	.03306	2.297	.287
Efektivitas PAD	70	.82	1.91	1.1800	.17695	.962	.287
Efektivitas Pajak Daerah	70	.91	1.79	1.1771	.16583	1.367	.287
Derajat Kontribusi BUMD	70	.02	.10	.0497	.02297	.679	.287
Belanja Modal	70	.12	.34	.2090	.04341	.453	.287
Pertumbuhan Ekonomi	70	2.01	7.22	4.3769	1.10787	-.399	.287
Valid N (listwise)	70						

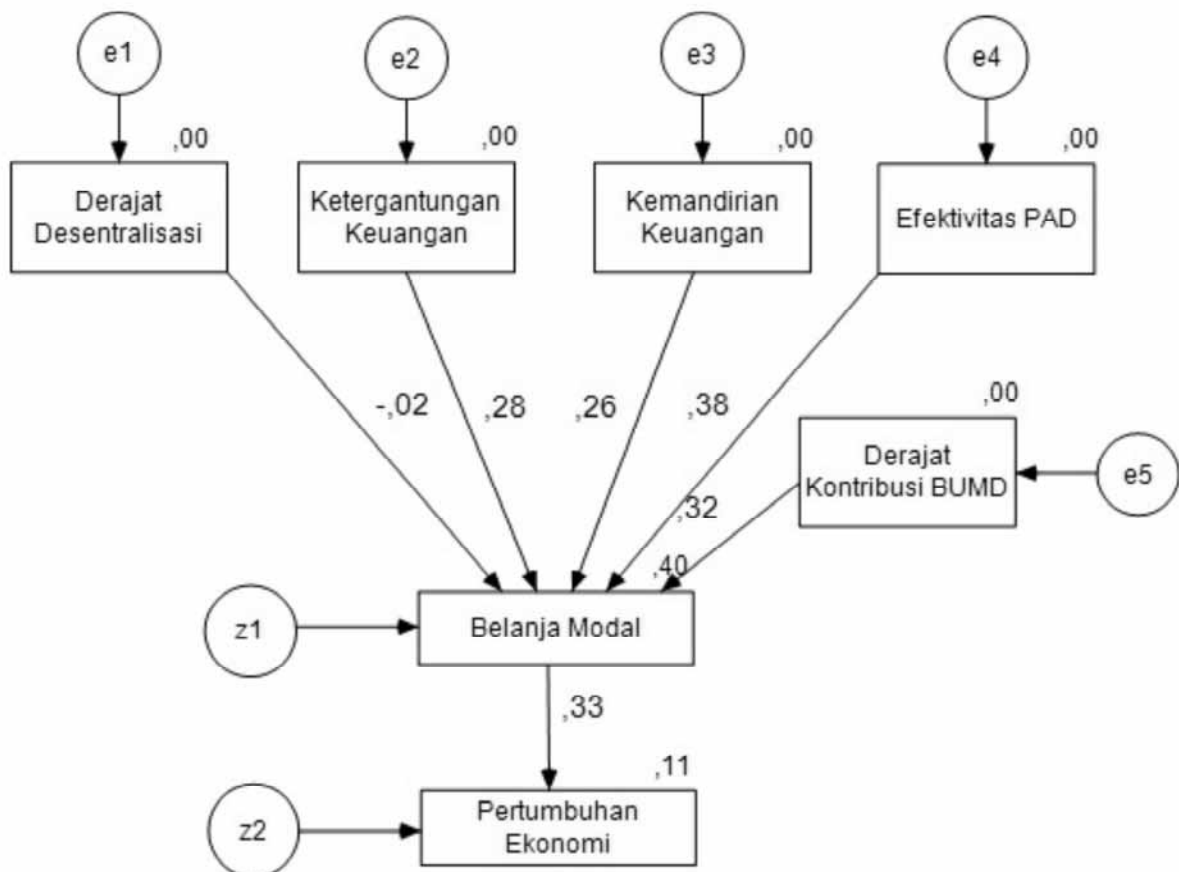
Sumber: data olahan

Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui pola hubungan ketujuh variabel penelitian, diuji tiga hipotesis. Hipotesis-hipotesis tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Pengujian hipotesis dengan *path analysis* didasarkan pada hasil pengolahan dari model penelitian.

Dari hasil pengolahan data dengan *path analysis* sebagaimana pada Gambar 1 dapat

diketahui besarnya koefisien masing-masing variabel terhadap variabel lainnya atau disebut dengan koefisien jalur (*path coefficient*). Pada analisis SEM digunakan evaluasi model berupa *squared multiple correlations* untuk variabel dependen dan nilai koefisien *Standardized Regression Weights* untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai *C.R.* (t hitung) untuk setiap jalurnya. Untuk menilai signifikansi model jalur antar konstruk dalam model struktural dilihat dari nilai *C.R.* jalur antar konstruk atau dengan melihat nilai *p-value*. Nilai *p-value* diperoleh dari hasil analisis *software* AMOS.



Chi-Square=123,570
 Probabilitas=.000
 GFI=.752
 AGFI=.538
 TLI=-.086
 RMSEA=.324

Gambar 1. Hasil Analisis SEM Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Hasil pengujian hipotesis penelitian yang diajukan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. *Standardized Regression Weights, C.R., dan p-value*

Hubungan antar Konstruk		Beta	C.R.	P
Ketergantungan				
Keuangan	→ Belanja Modal	0,283	3,029	0,002
Derajat Desentralisasi	→ Belanja Modal	-0,018	-0,188	0,851
Kemandirian Keuangan	→ Belanja Modal	0,263	2,814	0,005
Efektivitas PAD	→ Belanja Modal	0,378	4,037	***
Derajat Kontribusi				
BUMD	→ Belanja Modal Pertumbuhan	0,322	3,444	***
Belanja Modal	→ Ekonomi	0,326	2,865	0,004

*** Sig Alpha (<0,001)

Sumber: data olahan

Hipotesis pertama yang diajukan adalah kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD secara langsung berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa jalur antara ketergantungan keuangan dengan belanja modal memiliki koefisien beta 0,283 dan *C.R.* sebesar 3,029 dengan *p-value* < 0,05, maka secara statistik variabel ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Kemudian jalur antara derajat desentralisasi dengan belanja modal memiliki koefisien beta negatif 0,018 dan *C.R.* sebesar negatif 0,188 dengan *p-value* > 0,05, maka secara statistik variabel derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Untuk jalur antara kemandirian keuangan dengan belanja modal memiliki koefisien beta 0,263 dan *C.R.* sebesar 2,814 dengan *p-value* < 0,05, maka secara statistik variabel kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Jalur antara

efektivitas PAD dengan belanja modal memiliki koefisien beta 0,378 dan *C.R.* sebesar 4,037 dengan *p-value* < 0,05, maka secara statistik variabel efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Jalur antara derajat kontribusi BUMD dengan belanja modal memiliki koefisien beta 0,322 dan *C.R.* sebesar 3,444 dengan *p-value* < 0,05, maka secara statistik variabel derajat kontribusi BUMD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan.

Hipotesis kedua yang diajukan adalah alokasi belanja modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menyatakan bahwa jalur antara alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien beta 0,326 dan *C.R.* sebesar 2,865 dengan *p-value* < 0,05, maka secara statistik variabel alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan.

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan model sebagaimana pada Gambar 1 dan hasil analisis *standardized indirect effect*, menunjukkan pengaruh tidak langsung ketergantungan keuangan ke pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal adalah sebesar $0,28 \times 0,33 = 0,92$ atau sebesar 9,2%. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Untuk pengaruh tidak langsung derajat desentralisasi ke pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal adalah sebesar negatif $0,02 \times 0,33 = -0,006$. Kemudian pengaruh tidak langsung kemandirian keuangan ke pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal adalah sebesar $0,26 \times 0,33 = 0,86$ atau sebesar 8,6%. Selanjutnya pengaruh tidak langsung efektivitas PAD ke pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal adalah sebesar $0,32 \times 0,33 = 0,123$ atau sebesar 12,3%. Pengaruh tidak langsung derajat kontribusi BUMD ke pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal adalah sebesar $0,40 \times 0,33 = 0,105$ atau sebesar 10,5%. Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan.

Analisis dan Interpretasi Hasil

Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal diterima dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan indikasi bahwa besar kecilnya alokasi belanja modal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah, khususnya rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD. Namun temuan ini menunjukkan indikasi bahwa derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dengan rasio ketergantungan keuangan yang rendah maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap

pemerintah pusat/propinsi, yang berarti bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah lebih baik, sehingga dapat mengalokasikan belanja modal lebih besar. Demikian juga dengan rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD yang tinggi menunjukkan kemampuan keuangan daerah menjadi lebih tinggi sehingga memungkinkan untuk mengalokasikan belanja modal lebih besar. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiaji dan Adi (2007), yang menyatakan bahwa sejak otonomi daerah terjadi peningkatan kemampuan keuangan secara umum, namun lebih banyak disebabkan oleh perubahan *growth* PAD yang sangat signifikan. Sedangkan *share* PAD terhadap belanja justru tidak mengalami peningkatan. Dalam pengelolaan keuangan sektor publik analisis kinerja keuangan terhadap alokasi investasi atau belanja modal memang belum banyak dilakukan, namun dalam sektor privat hal tersebut sudah sangat lazim. Penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2009) tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Berdasarkan Return On Investment, Asset Turnover, dan Economic Value Added Terhadap Investasi Aktiva Tetap, menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan alokasi investasi aktiva tetap.

Pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi diterima dalam penelitian ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi juga ditentukan oleh alokasi belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wong (2002) yang menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap PAD ketika pemerintah melakukan pembangunan pada sektor industri. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Adi (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Todaro (1997) dalam Adi (2007) secara spesifik menyebutkan ada tiga komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal,

pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja. Hasil ini juga mendukung penelitian Lin and Liu (2000) yang membuktikan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara *share* belanja investasi dengan tingkat desentralisasi. Namun hasil riset ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) yang menyatakan bahwa belanja pembangunan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh kinerja keuangan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi diterima dalam penelitian ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung adalah kinerja keuangan daerah. Todaro (1997) dalam Adi (2007) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja. Tiga faktor di atas tidak menyebutkan kinerja keuangan daerah. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa dengan desentralisasi atau otonomi daerah, muncul indikator lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu kinerja keuangan daerah, meskipun secara tidak langsung. Pengaruh tidak langsung terbesar dari kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah efektivitas PAD. Hasil ini berseberangan dengan Saragih (2003) yang menyatakan bahwa kenaikan PAD merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi. Namun temuan ini mendukung Bappenas (2004) yang menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis menunjukkan beberapa bukti empiris yang cukup penting yaitu:

1. Pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kinerja keuangan khususnya rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD. Namun hasil penelitian menunjukkan indikasi bahwa derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi alokasi belanja modalnya, meskipun secara rata-rata alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah (21%) masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pemerintah kabupaten/kota secara nasional (28,8%).
2. Alokasi belanja modal memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa salah satu fungsi anggaran pemerintah daerah yakni sebagai stimulus perekonomian telah berjalan.
3. Hasil analisis mengindikasikan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung adalah kinerja keuangan daerah. Pengaruh tidak langsung terbesar dari kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah efektivitas PAD. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa dengan otonomi daerah, muncul indikator lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu kinerja keuangan daerah, selain tiga faktor utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja.

Keterbatasan Penelitian

Hasil riset ini mempunyai beberapa keterbatasan: (1) Riset dilakukan hanya menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah

daerah tahun 2006-2009, tanpa dilakukan konfirmasi dalam bentuk wawancara atau kuesioner untuk mengetahui kendala-kendala dalam pencapaian kinerja keuangan yang baik, (2) penelitian ini baru menguji tujuh indikator kinerja keuangan yakni: rasio derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, efektivitas pajak daerah dan derajat kontribusi BUMD, sedangkan rasio lain seperti rasio efisiensi belanja, efisiensi PAD, keserasian belanja, rasio pertumbuhan, rasio likuiditas, solvabilitas, DSCR, DSR dan rasio belanja terhadap PDRB belum diteliti, (3) penelitian ini belum menganalisis pengaruh langsung kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

Implikasi dan Saran Penelitian

Riset ini adalah pengembangan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya, dengan membangun sebuah model lain dengan menggunakan pengujian secara simultan sehingga dapat diketahui efek langsung dan efek tidak langsung sebuah variabel dengan variabel lain.

Temuan dalam penelitian ini juga diharapkan memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

- a. Pemerintah kabupaten/kota harus senantiasa meningkatkan kinerja keuangan karena dapat berdampak pada peningkatan alokasi belanja modal yang digunakan untuk pelayanan publik.
- b. Belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah merupakan stimulus perekonomian daerah, sehingga harus mendapatkan prioritas yang memadai.
- c. Pemerintah kabupaten/kota harus senantiasa meningkatkan kinerja keuangan karena memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun secara tidak langsung.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) menambahkan indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah, (2) menggunakan data laporan keuangan daerah paling tidak lima tahun terakhir, (3) menguji pengaruh langsung antara kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. (2005). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Adi, P. H. (2007). *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol 08, No. 1.
- _____ (2007). *Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi*, FE UKSW.
- Ferdinand. A. (2002). *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen. Aplikasi Model-Model Rumit dalam Penelitian untuk Tesis S-2 dan Disertasi S-3*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fitriyanti & Pratolo. (2008). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi*, Proceeding Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik, Jakarta.
- Ghozali, I. (2008). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program*

- AMOS 16.0*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- _____ (2008). *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hamzah, A. (2008). *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur*, Universitas Trunojono.
- Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000) *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*, Economic Development and Cultural Change. Chicago, Vol 49.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Widayat & Amirullah. (2002). *Riset Bisnis*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wong, J. D. (2004). *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Fall, 16.3.